

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU
TAHUN 2025 - 2029**



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN TELUK SEGARA**

Jl. Veteran No. 01 Kelurahan Jitra
Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu

Assalammu'alaikum Wr Wb.

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan atas tersusunnya RENSTRA Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu periode 2025 – 2029. Adapun maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA untuk memberikan gambaran rencana kegiatan dan program yang akan dilaksanakan oleh PD Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, termasuk kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Teluk Segara selama periode 2025-2029.

Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dengan segala keterbatasan tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi, yang menjadi pemikiran untuk pembenahan kegiatan dan program yang akan datang dan dituangkan dalam penyusunan RENSTRA ini.

Dengan tersusunnya RENSTRA Kecamatan Teluk Segara semoga dapat menjadi acuan bagi perencanaan yang akan datang dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Teluk Segara.

KEPALA KECAMATAN TELUK SEGARA
KOTA BENGKULU

BENY HARTANTO, S.Ag
Pembina/ IV.a
NIP. 19680930 199203 1 004

LEMBAR PENETAPAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu berdasarkan,

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
6. Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu Tahun 2025-2029.

dengan ini menetapkan :

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU TAHUN 2025-2029

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Tahun 2025–2029 ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 2025

Kepala Kecamatan Teluk Segara
Kota Bengkulu

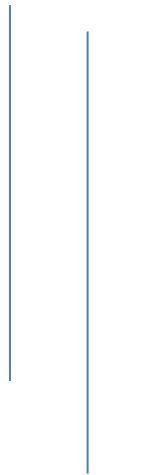
BENY HARTANTO, S.Ag
Pembina/ IV.a
NIP. 19680930 199203 1 004

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	Halaman
	1.1. Latar Belakang	6
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	7
	1.3. Maksud dan Tujuan	7
	1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
	2.2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	22
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	3.1. Tujuan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029	26
	3.2. Sasaran Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029	26
	3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	27
	3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	27
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	4.1. Uraian Program	28
	4.2. Uraian Kegiatan	28
	4.3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	29
	4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	30
	4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	31
	4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	32
BAB V	PENUTUP	33



PEMERINTAH KOTA BENGKULU



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU
TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
KECAMATAN TELUK SEGARA**
Jl. Veteran No. 01 Kelurahan Jitra
Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai salah satu fungsi dari OPD, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan OPD lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijamin melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh OPD yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Teluk Segara tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Teluk Segara pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Teluk Segara, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dalam pembangunan Pemerintah Kota Bengkulu. Renstra Kecamatan Teluk Segara memuat keadaan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2025–2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun yang menjadi Landasan Hukum dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2025–2029 Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang - undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Undang – undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
11. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian tugas dan fungsi kecamatan dan kelurahan di lingkungan dan kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Teluk Segara adalah menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Teluk Segara, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Teluk Segara, dan juga sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dokumen RPJM Daerah, serta dasar/acuan Kecamatan untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Selain itu Rencana strategis pembangunan kecamatan dilandasi pada aspek pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan penguatan kelembagaan untuk mencapai pembangunan yang kompetitif sehingga mampu menaikkan taraf hidup masyarakat kecamatan dan pengembangan pembangunan wilayah yang lebih optimal. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan digerakkan oleh kemampuan sumber daya yang ada untuk memanfaatkan potensi yang tersedia sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Teluk Segara 2025–2029 sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 3.1. Tujuan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029
 - 3.2. Sasaran Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029
 - 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
 - 3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - 4.1. Uraian Program
 - 4.2. Uraian Kegiatan
 - 4.3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
 - 4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
 - 4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
 - 4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

- BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok yang telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Susunan organisasi pada Kecamatan Teluk Segara berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
 1. Kasubbag Kepegawaian dan Umum
 2. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan.
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- f. Seksi Kesejahteraan sosial.
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan Susunan Organisasi Kecamatan Teluk Segara :

- **Camat**

Camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

- **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- **Seksi**

Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

- **Sub Bagian.**

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Uraian Tugas :

➤ **Camat.**

Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan. Untuk penyelenggaraan tugas-tugas dimaksud, Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas dan pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
7. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
8. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lain sebagai bahan pertanggung jawaban kepada masyarakat.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Sekretariat Kecamatan.**

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Sekretariat Kecamatan membawahi :

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

➤ **Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :**

1. Sebagai Penyusun Rencana Kerja Anggaran maupun Rencana Kerja Sub Bagian
2. Menyiapkan petunjuk teknis serta pedoman terhadap pengelolaan administrasi
3. Menyiapkan bahan konsultasi serta koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi
4. Sebagai pengumpul, pengelola, serta menganalisa data kebutuhan perlengkapan
5. Sebagai pelaksana teknis pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pemeliharaan perlengkapan/inventaris kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Sebagai penyelenggara terkait pelayanan administrasi kepegawaian
7. Menyiapkan petunjuk teknis serta pedoman terkait pembinaan PNS di wilayah kecamatan
8. Sebagai Koordinator pelaksana tugas bendaharawan barang
9. Sebagai pelaksana dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian
10. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :**

1. Sebagai pelaksana dalam menyiapkan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ditingkat Kecamatan
2. Sebagai Pelaksana dalam menyiapkan bahan pedoman serta petunjuk teknis sibidang perencanaan dan keuangan
3. Sebagai pelaksana dalam menyiapkan bahan penyusun rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta menetapkan kinerja dilingkungan kecamatan
4. Sebagai pelaksana penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang perencanaan dan keuangan
5. Sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan
6. Pengkoordinasikan pelaksana tugas pemegang kas
7. Sebagai koordinator dalam menyusun laporan keuangan dan pelaksana kegiatan
8. Sebagai pelaksana dalam monitoring evaluasi serta pelaksana tugas sub bagian
9. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atas berdasarkan bidang tugasnya.

➤ **Seksi Pemerintahan** mempunyai tugas:

1. Menyusun program/ rencana seksi pemerintahan
2. Membagi tugas kepada bawahannya sesuai bidang tugasnya
3. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahannya
4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas seksi pemerintahan.
5. Melakukan pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan.
6. Melakukan pembinaan RW /RT
7. Melakukan urusan pemerintahan umum
8. Memfasilitasi penyusunan peraturan kelurahan.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi asset pemerintah kota dan kekayaan lainnya di tingkat kecamatan.
10. Melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan
11. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan PBB.
12. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lain sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.
14. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

➤ **Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan** mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana/proram seksi pembangunan masyarakat kelurahan
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.
4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-unangan yang berhubungan bidang tugas.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba kelurahan di wilayah kerjanya
6. Mempasilitasi kegiatan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi ditingkat kecamatan.
7. Mempasilitasi pelaksanaan pembinaan pembangunan dan pembinaan lingkungan hidup.
8. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Menyusun dan menyampaikan lap[oran pelaksanaan tugas lain sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

➤ **Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban** mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana program seksi ketenteraman dan ketertiban
2. Membagi tugas kepada bawahannya sesuai dengan bidangnya
3. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.
4. Menghimpun dan mempelajari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan uraian tugas.
5. Mempersiapkan petunjuk teknis bidang pelaksanaan keamanan dan ketertiban
6. Melaksanakan tugas-tugas pembinaan ketenteraman, ideologi Negara dan politik dalam negeri.
7. Menyelenggarakan pembinaan Satpol PP dan linmas kecamatan
8. Menyelenggarakan ketertiban wilayah
9. Merekomendasi pelayanan surat keterangan bidang keamanan dan ketertiban
10. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya.
11. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lain sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.
12. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Kesejahteraan Sosial** mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana/proram Seksi Kesos
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.
4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan seksi Kesos.
5. Memfasilitasi pengawasan kegiatan program pendidikan dan pelatihan genmu.
6. Merekomendasi pelayanan surat bidang kesejahteraan sosial.
7. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat dan KB.
8. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
9. Mengkoordinasikan bahan penyuluhan WAJAR
10. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial masyarakat LSM dan keagamaan.
11. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lain sebagai bahan pertanggung jawaban.
13. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Pelayanan Umum** mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program sesuai bidang tugasnya
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan
4. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku
5. Memberikan pertimbangan dengan pelayan perijinan
6. Menyelenggarakan pelayananan kependudukan dan capil
7. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan pertamanan
8. Menyiapkan bahan koordinasi lapoaran pelaksanaan tugas lain sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
9. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh atasan.

❖ **Tugas pokok dan fungsi kecamatan**

a. Tugas.

Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupanb kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

b. Fungsi.

1. Penyelenggaran pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan;
2. Melaksanakan urusan pemerintahan pemerintahan Kelurahan, Kependudukan dan Administrasi Catatan Sipil.
3. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, pertanian dan kehutanan, industri kecil/usaha sector informal serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
5. Pembinaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial;
6. Penyusunan program pengendalian dan pelaporan.

Susunan organisasi pada Kelurahan di Kecamatan Teluk Segara berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Lurah
- b. Sekretaris Lurah
- c. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
- d. Seksi Pembangunan
- e. Seksi Pelayanan Umum

Penjelasan Susunan Organisasi Kelurahan Se Kecamatan Teluk Segara :

- **Lurah**

Lurah mempunyai tugas menjalankan kewenangannya yang dilimpahkan oleh Walikota dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah, Kemasyarakatan dalam wilayah.

- **Sekretaris Lurah.**

Sekretaris Lurah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah.

- **Seksi.**

Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah;

Uraian Tugas :

➤ **Lurah**

Lurah mempunyai tugas menjalankan kewenangannya yang dilimpahkan oleh Walikota dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah, Kemasyarakatan dalam wilayah. Untuk penyelenggaraan tugas-tugas dimaksud, Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana / program Sekretariat Kelurahan;
- b. Membagian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- c. Memeriksa dan penilaian hasil kerja bawahan;
- d. Penghimpunan dan mempelajari Peraturan Perundang – undang yang berkaitan dengan bidang tugas pemerintah Kelurahan;
- e. Pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya;
- f. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah Kelurahan;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai bidang tugasnya;
- j. Penyusunan dan penyampaian pelaporan pelaksanaan tugas lain sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap atasan;

- **Sekretariat Kelurahan** mempunyai tugas :
- Menyusun rencana / program Sekretariat Kelurahan;
 - Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi;
 - Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
 - Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang – undang yang berkaitan dengan bidang tugas pemerintah Kelurahan;
 - Membuat usulan pengadaan kebutuhan operasional kantor dilingkungan Kelurahan;
 - Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan;
 - Melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan Pembina penyelenggara tugas umum pemerintah Kelurahan, pembagunan, pembinaan kesejahteraan rakyat;
 - Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan umum pemerintah, pembagunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
 - Memberi pelayanan terhadap masyarakat di bidang pemerintah dan kesejahteraan;
 - Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun peran serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Kelurahan;
 - Melaksanakan pembuatan dan pengisian data yang menjadi urusan sekretaris Kelurahan;
 - Menyediakan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lain sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- **Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum** mempunyai tugas:
- Menyusun rencana / program seksi pemerintah dan Ketertiban Umum sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
 - Mempelajari ketentuan perturan perundang-undangan sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksana kegiatan
 - Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintah kelurahan sesuai yang berlaku untuk meningkatkan tertib administrasi
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan inventaris aset Pemerintah Kota dan kekayaan pemerintah lainnya di tingkat kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib dan terpelihara
 - Melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

- f. Melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah
- g. Membantu melaksanakan pemungutan PBB sesuai ketentuan yang berlaku untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran.
- h. Memberikan penyuluhan pemeliharaan trantib dan linmas kepada RT/RW sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban.
- i. Menyiapkan tempat-tempat strategis pembuatan pos komando penanganan bencana alam dan pos keamanan lingkungan dibawah koordinasi kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku
- j. Membuat Peta Rawan Bencana dan peta rawan kejahatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan evakuasi
- k. Membantu kecamatan dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang usahnya belum memiliki izin dari pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar
- l. Memberikan peringatan dini bahaya bencana terhadap masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kesiap siagaan masyarakat terhadap bencana
- m. Menggerakan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam dan pemulihan akibat bencana alam dilingkungan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengantisipasi bencana
- n. Memberikan pembinaan terhadap personil ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas personil
- o. Melaksanakan administrasi ketahanan sipil sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi kepentingan masyarakat
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pemerintahan dan ketertiban umum sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran
- q. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar
- r. Menyusun dan merapikan laporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan dan ketertiban umum sesuai ketentuan yang berlaku sesuai pertanggung jawaban kepada atasan.
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan.

➤ **Seksi Pembangunan** mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana / program seksi pembangunan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan bidang tugas pemerintah Kelurahan;

- e. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap pengkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.
- f. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- g. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan;
- h. Melaksanakan perekonomian dan pembangunan di Kelurahan;
- i. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- j. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah lembaga pemberdayaan masyarakat;
- k. Membantu melaksanakan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- l. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sadakah;
- m. Membantu pelaksanaan kegiatan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- n. Membantu Kecamatan melaksanakan program penuntasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, olahraga dan kepemudaan;
- o. Melaksanakan pembuatan dan pengisian papan data monografi pembangunan di Kelurahan;
- p. Melaksanakan dan pembuatan pengisian data yang menjadi urusan seksi pembangunan;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas seksi pembangunan kepada lurah;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

➤ **Seksi Pelayanan Umum** mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana/program seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan bidang tugas pemerintah Kelurahan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja didalam maupun diluar dilingkungan kelurahan tentang pelayanan kepada masyarakat mengenai hal – hal yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban;

- f. Memberikan penyuluhan dalam rangka pemeliharaan trantib dan linmas melalui RT/RW;
- g. Menyiapkan tempat – tempat strategis pembuatan pos komando penanganan bencana alam (Pos PBA) dan pos keamanan Lingkungan (Pos Kamling) dibawah koordinasi Kecamatan;
- h. Membuat peta rawan bencana dan peta rawan kejahatan;
- i. Membantu kecamatan guna mengarahkan masyarakat yang usahannya wajib memiliki izin pemerintah;
- j. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat terhadap bahaya bencana serta terlibat aktif dalam penanggulangan bencana alam dan pemulihan akibat bencana alam di wilayah kerjanya ;
- k. Memberikan pembinaan personil ketentraman dan ketertiban;
- l. Membuat dan mengisi data monografi bidang ketentraman dan ketertiban;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban kepada Lurah;

❖ Tugas pokok dan fungsi Kelurahan

a. Tugas.

Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas menjalankan kewenangannya yang dilimpahkan oleh Walikota dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah, Kemasyarakatan dalam wilayah.

b. Fungsi.

1. Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kelurahan;
2. Peberdayaan masyarakat;
3. Pelayanan masyarakat;
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pemeliharaan prasarana fasilitas umum.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sedangkan jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tahun 2025 dan aset yang dimiliki antara lain terdiri :

Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan, Jabatan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Tahun 2024				
Berdasarkan Status Pegawai dan Jenis Kelamin				
No	Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pegawai Negeri Sipil	9	2	11
2.	Pegawai Kontrak	3	6	9
	Jumlah	12	8	20

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Tahun 2024				
Berdasarkan Golongan dan Jabatan				
No	Golongan	Jabatan		Jumlah
		Struktural	Staf	
1.	Gol IV	4	-	4
2.	Gol III	6	-	6
3.	Gol II	-	-	-
	Jumlah	10	10	10

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Tahun 2024								
Berdasarkan Pendidikan								
No	Pegawai	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1/D4	D3	SMA	SMP	SD	
1.	Pegawai Negeri Sipil	3	6	-	2	-	-	11
2.	Pegawai Kontrak	1	5	-	3	-	-	9
	Jumlah	4	11	-	5	-	-	20

Sarana dan Prasarana pada Kantor Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tahun 2025 antara lain terdiri :

Tabel 2.4

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Bangunan Kantor	1 Kantor	Rusak
2.	Kendaraan Roda Empat	3 Unit	Baik
3.	Kendaraan Roda Dua	7 Unit	Baik
4.	Komputer	2	Rusak
5.	Laptop	6 Unit	4 Baik dan 2 Perlu di service
7.	Kursi Tamu	2 Buah	Baik
8.	Printer	8 Unit	2 Baik dan 6 Perlu di service
9.	Lemari penyimpanan	9 Buah	Baik
10.	Kipas Angin	7	5 Baik dan 2 Perlu di service
11.	Lemari Kaca	2 Buah	Baik
12.	Sound System	2 Unit	Baik
13.	Kursi Lipat	-	-
14.	Kursi Plastik	60 Buah	Baik
15.	Televisi	3 Unit	Baik
16.	AC	4 Unit	Baik

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya melaksanakan mutu pelayanan berbasis kinerja serta berpedoman pada pelayanan prima Kecamatan Teluk Segara, diperlukan peningkatan secara internal dan eksternal. Peningkatan secara internal meliputi penyelenggaraan pelayanan urusan umum, kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan pelayanan keuangan dan menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan yang maksimal.

Sedangkan peningkatan secara eksternal yaitu meliputi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal pula. Dalam menunjang kinerja pelayanan Kecamatan Teluk Segara tersebut diperlukan 5 (lima) program kegiatan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni :

Tantangan :

1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia
3. Lemahnya manajemen informasi data kecamatan
4. Belum maksimalnya koordinasi dari OPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah

Peluang :

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu.
2. Mudah akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja.
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi.

D. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya di alokasikan untuk masyarakat umum. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur kelurahan dan lembaga masyarakat dan masyarakat.

2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring dengan telah ditetapkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ditetapkannya Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan sebagai salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota (pasal 24 ayat 1 No. 32 Tahun 2014). Maka kondisi yang diinginkan agar fungsi koordinator pelayanan administrasi umum pemerintahan dapat berjalan secara efektif adalah mendukung koordinasi antar SKPD, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar masyarakat dan SKPD, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kecamatan Teluk Segara merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota dan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bidang Pemerintah dan Pelayanan Kepada Masyarakat dan dengan sendirinya memerlukan dukungan kemampuan Sumber Daya yang profesional serta memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas fungsi dan kewenangan Kantor Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu dengan kelurahan yang ada diwilayah kecamatan yang secara bersama-sama melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan merencanakan pembangunan dan pengembangan di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dihadapi oleh kecamatan Teluk Segara saat ini adalah :

1. Kurangnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan
2. Masih kurangnya peran aktif masyarakat dan kelompok masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan

Tabel 35. Identifikasi Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Kurang Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Pelayanan Administrasi yang tepat waktu
2.	Pemberdayaan Masyarakat	Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat kecamatan	Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengusulan rencana pembangunan dan tingkat keaktifan organisasi kemasyarakatan yang ada

Tabel 2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Fungsi penyelenggaraan pemerintahan	Belum Optimal Pelayanan Administrasi umum ditingkat kecamatan	SOP Pelayanan Administrasi	Keterbatasan tenaga aparatur pemahaman SOP belum optimal	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan administrasi tepat waktu	-
Pemberdayaan Masyarakat	Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan ketentraman umum		Keterlambatan SDM dan anggaran	Kebersamaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan ketertiban keamanan lingkungan	-

Telaahan renstra K/L dan renstra Provinsi

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Provinsi Bengkulu, terdapat :

Permasalahan : masih belum maksimalnya pelayanan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.

Faktor pendukung : motivasi serta metode kerja yang substantif

Faktor penghambat : kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RT RW No.4 Tahun 2021)

Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kota Bengkulu tahun 2021 – 2041, Kecamatan Teluk Segara termasuk dalam sistem rencana ruang wilayah sebagai pusat lingkungan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021–2041, yaitu :

- Sub Pusat Pelayanan Kota I Kecamatan Teluk Segara dengan fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat sarana pelayanan umum, pusat pariwisata, pusat pemerintahan kecamatan;
- Terminal Tipe C Pasar Barukoto di Kecamatan Teluk Segara;
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas III di Kecamatan Muara Bangkahulu dan Kecamatan Teluk Segara;

- Unit distribusi IPA Surabaya dengan jaringan pipa meliputi Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Sungai Serut, dan Kecamatan Muara Bangkahulu;
- Kelurahan Kebun Keling, Kelurahan Malabero, Kelurahan Sumur Meleleh, Kelurahan Berkas di Kecamatan Teluk Segara;
- Gerga Tabut Berkas, Gedung Pengadilan Kuno, Rumah Bekas Kediaman Bung Karno, Makam Sentot Ali Basyah, Benteng Marlborough, Tugu Robert Hamilton, Tugu Thomas Parr, Makam Inggris, Masjid Jamik
- ung Karno, Bangunan Kantor Pos Brokoto, Rumah Demang Taha, Rumah Demang Karim, Rumah Demang Kader, Rumah Demang Mursalin, Rumah Demang Manan, Eks Rumah Ka. Peln Pondok Besi, Rumah Dr. Abu Hanifah Bubungan Tiga Samping Bank Indonesia, Gedung BKOW, Rumah Kediaman Gubernur Bengkulu, Situs Gedung Nasional (KNID) Bubungan Tiga, Jel (Penjara Malabro), Rumah Sebrang Jell Milik Sinsui, Eks Sekolah China, Bunker Jepang Pangkal Jembatan, Rumah Tradisional Pak Arifin, Bangunan Eks Rumah Residen Abdullah, Rumah Residen Rejamat Gedung Kolam, Rumah Ka. PLN Gedung Kolam, Gereja Saint Yohannes Samping Rumah Gubernur, Gedung Eks Sekolah Milo (Bangunan Asli UNHAZ), Kawasan China Bazar/China Town, Titik Tri Angulasi Patok 1 Bencolen diatas Tulisan Tapak Paderi, Situs Tugu Azimut Kota Bencolen Km 1, Klenteng/Vihara Kampung China, Bekas Bangunan Gudang Garam dan Kompleks Makam Inggris di Kecamatan Teluk Segara;
- Kawasan Wisata Pantai di Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung, dan Kecamatan Ratu Samban dengan luas lebih kurang 44 (empat puluh empat) hektar;
- Pulau Tikus di Kecamatan Teluk Segara;
- Kawasan Terminal Tipe C Pasar Barukoto Kecamatan Teluk Segara.

B. Isu Strategis

Memperhatikan dinamika lingkungan eksternal dan internal serta kecenderungan yang terjadi beberapa tahun terakhir maka diperkirakan terdapat dua tema penting yang akan tetap menjadi isu strategis dan perhatian dari berbagai pihak yang juga akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bengkulu yaitu globalisasi kemajuan teknologi, intensitas persaingan kegiatan ekonomi yang makin tinggi dan pemerintahan yang baik (transparansi, partisipasi, akuntabilitas) yang menjadi tuntutan kebutuhan.

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolak ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bengkulu pada umumnya.

Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari aspek yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu dan
- l. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Ketertiban masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsure masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses musyawarah pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsure dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui musrenbang.

Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari : Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik). Kegiatan pembangunan kecamatan (fisik). Kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Teluk Segara memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel” dan “Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik” Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Presentase Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Yang Tepat Waktu dan Persentase Kualitas Layanan Pemerintah Kepada Masyarakat.

3.2 Sasaran Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang harus dicapai yaitu Meningkatkan Pelayanan Dibiidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Tabel. 25 **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN TELUK SEGARA :**

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan terutama dalam meningkatkan kompetensi Aparatur.

- Strategi yaitu meningkatkan kompetensi aparatur kecamatan dan kelurahan.

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dengan memperhatikan strategi pembangunan diatas, maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk peningkatan peran kelurahan dalam pelayanan publik.

- Arah kebijakan yang akan dicapai yaitu peningkatan peran serta kelurahan dalam pelayanan publik.

Strategi dan Arah Kebijakan dapat dilihat pada tabel T – C.26

Tabel T - C. 26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Meningkatkan Penataan Administrasi Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan serta Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Meningkatkan Kualitas Layanan Pemerintah Kepada Masyarakat	Peningkatan Kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

4.2 Uraian Kegiatan

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antara lain :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Subkegiatan terdiri antara lain :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan/ Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing
- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat di tabel T - C.27 :

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Subkegiatan terdiri antara lain :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan/ Material
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing
- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Kecamatan Teluk Segara dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah mengacu pada RPD Kota Bengkulu, dalam mendukung misi Pemerintah Kota Bengkulu yang pertama yakni Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Profesional, Transparan dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD tersebut dapat digambarkan dalam tabel T – C.28 :

TABEL. 28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPD
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (PD)	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
2.	Inovasi Perangkat Daerah	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi
3.	Persentase Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	80%	82%	85%	90%	90%	90%	90%

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Adapun Indikator Program Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 7.2 yang ditampilkan dalam **Tabel. 29** dibawah ini :

TABEL. 29
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

No.	Indikator Tujuan Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Program
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Presentase Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Tepat Waktu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (PD)	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terfasilitasi dengan baik
2.				Inovasi Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3.			Persentase Kualitas Layanan Pemerintah Kepada Masyarakat	Persentase Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat
4.					Cakupan Peran Serta Tokoh Agama/ Masyarakat dalam Pembinaan Masyarakat
5.					Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Teluk Segara 2025-2029 berisi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Teluk Segara dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kota Bengkulu.

Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Segara.

Kaidah Pelaksanaan

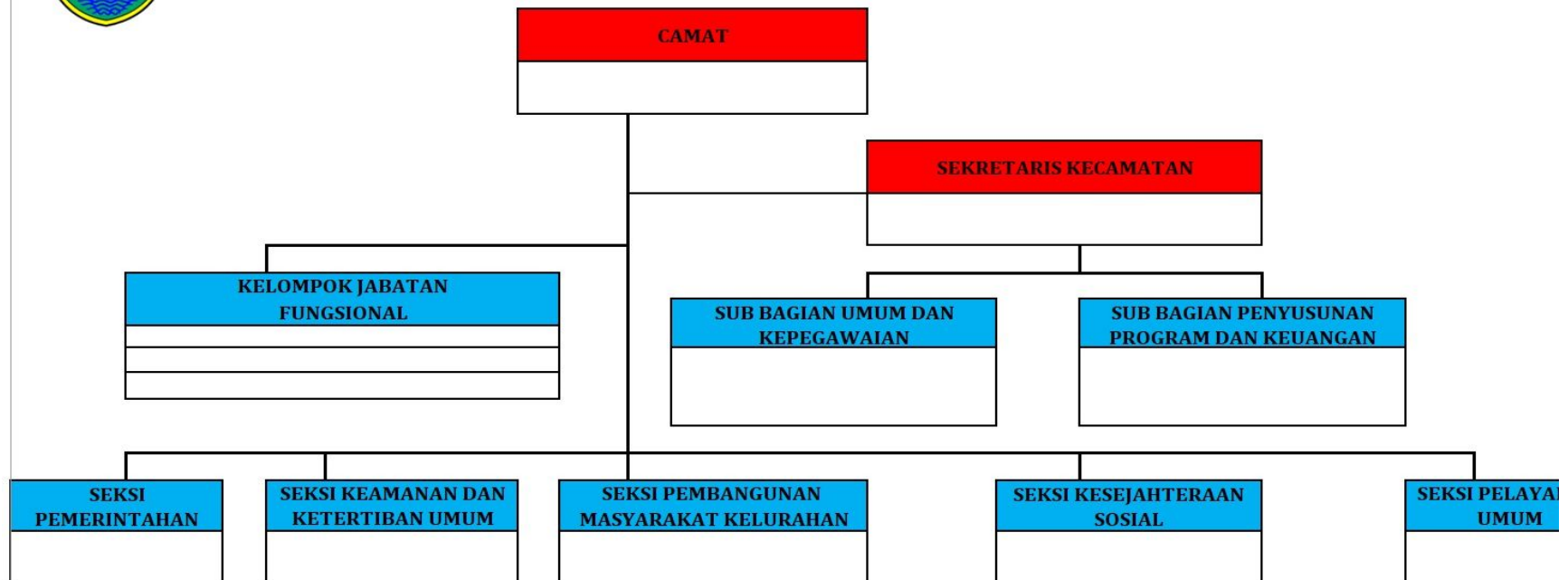
1. Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan kontrak kerja atau kesanggupan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.
2. Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan renja OPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) initerdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Kondisi daerah, tugas dan fungsi OPD, tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.
4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi renstra maka akan dilakukan penyesuaian.

Kepala Kecamatan Teluk Segara
Kota Bengkulu

BENY HARTANTO, S.Ag
Pembina/ IV.a
NIP. 19680930 199203 1 004



**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TELUK SEGARA
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 10 TAHUN 2016**



NAN

	NAN
--	-----

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Tata Kelola Pemerintahan	Stabilitas Politik Global yang Dinamis	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kinerja Birokrasi	Optimalisasi Pelayanan Publik yang Prima
	Pemberdayaan Masyarakat					

Bengkulu, 2025
Kepala Kecamatan Teluk Segara

BENY HARTANTO, S.Ag
Pembina/ IV.a
NIP. 19680930 199203 1 004

TABEL 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK Sasaran RPJMD yang	Tujuan PD	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel		Presentase Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Tepat Waktu	82%	85%	90%	90%	90%	90%	Jumlah Dokumen Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Tepat Waktu / Jumlah Seluruh Dokumen Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan X100%
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (PD)	B	BB	BB	BB	BB	BB	Hasil Evaluasi atas implementasi Sakip Perangkat Daerah (PD)
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Inovasi Perangkat Daerah	1 inovasi	1 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	2 inovasi	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik		Persentase Kualitas Layanan Pemerintah Kepada Masyarakat	82%	85%	90%	90%	90%	90%	Jumlah Dokumen Pelayanan Tepat Waktu / Jumlah Seluruh Dokumen Pelayanan X 100%
		Meningkatkan Penataan Administrasi Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan serta Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	82%	85%	90%	90%	90%	90%	Jumlah Permohonan Layanan Administrasi di Kecamatan : Jumlah Layanan Administrasi Perizinan/non Perizinan yang diterbitkan x 100%

Bengkulu, 2025
Kepala Kecamatan Teluk Segara

BENY HARTANTO, S.Ag
Pembina/ IV.a
NIP. 19680930 199203 1 004

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi dan Teknologi (Digitalisasi Layanan Pemerintahan, seta Inovasi dalam Administrasi Publik)	Infrastruktur (Jalan Dan Drainase)	Peremberdayaan Masyarakat (pelatihan ketrampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat)	Ekonomi (dukungan Terhadap UMKM)	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)

Bengkulu, 2025
Kepala Kecamatan Teluk Segara

BENY HARTANTO, S.Ag
Pembina/ IV.a
NIP. 19680930 199203 1 004

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan Dan Kemasyarakatan	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan Dan Kemasyarakatan	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan Dan Kemasyarakatan	
2		Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung	Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung	
3		Peningkatan Fasilitas Kecamatan Dalam Setiap Bentuk Pelayanan Publik	Peningkatan Fasilitas Kecamatan Dalam Setiap Bentuk Pelayanan Publik	
4	Peningkatan Kualitas SDM yang Akuntabel	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan	
5	Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Kelurahan	

Bengkulu, 2025
Kepala Kecamatan Teluk Segara

BENY HARTANTO, S.Ag
Pembina/ IV.a
NIP. 19680930 199203 1 004

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan		Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah dengan baik		Presentase Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Tepat Waktu	1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (PD)	- <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Inovasi Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Meningkatkan Penataan Administrasi Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan serta Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan			Persentase Kualitas Layanan Pemerintah Kepada Masyarakat	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
					Persentase Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						- <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan/ Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						- <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	

						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						- <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kepada Masyarakat sesuai SOP			2). Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
						- <i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
						- <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	
						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan			3). Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
						- <i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

						- <i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	
						Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	
						Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
			Meningkatnya Sinergitas Pemerintah dengan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama			4). Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
						- <i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
						Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan			5). Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
						- <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	
						Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
						6). Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	
						<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	

						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat	
--	--	--	--	--	--	---	--

Bengkulu, 2025
Kepala Kecamatan Teluk Segara

BENY HARTANTO, S.Ag
Pembina/ IV.a
NIP. 19680930 199203 1 004

Tabel 4.3 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaa

[illegible]

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penyediaan Bahan/Material		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1 Paket (20 jenis)	1 Paket (20 jenis)	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000	Rp 25,220,460	Rp 24,610,931	Rp 26,266,302	Rp 26,266,302	Rp 26,266,302	Rp 26,266,302	Rp 26,266,302	Rp 26,266,302	Rp 26,266,302
Fasilitas Kunjungan Tamu		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan (2 jenis)	1 Laporan (2 jenis)	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan (1 jenis)	1 Laporan (1 jenis)	Rp 70,518,000	Rp 70,518,000	Rp 70,518,000	Rp 70,518,000	Rp 70,518,000	Rp 70,518,000	Rp 70,518,000	Rp 70,518,000	Rp 70,518,000	Rp 70,518,000	Rp 70,518,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			4 Jasa	4 Jasa	Rp 180,332,500	Rp 185,332,500	Rp 192,332,500	Rp 193,118,000	Rp 193,118,000	Rp 193,118,000	Rp 193,118,000	Rp 193,118,000	Rp 193,118,000	Rp 193,332,500	Rp 192,332,500
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan (1 jenis)	1 Laporan (1 jenis)	Rp 2,214,500	Rp 2,214,500	Rp 2,214,500	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Rp 2,214,500	Rp 2,214,500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan (2 jenis)	1 Laporan (2 jenis)	Rp 39,000,000	Rp 39,000,000	Rp 39,000,000	Rp 39,000,000	Rp 39,000,000	Rp 39,000,000	Rp 39,000,000	Rp 39,000,000	Rp 39,000,000	Rp 39,000,000	Rp 39,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan (4 jenis)	1 Laporan (4 jenis)	Rp 5,000,000	Rp 10,000,000	Rp 17,000,000	Rp 17,000,000	Rp 17,000,000	Rp 17,000,000	Rp 17,000,000	Rp 17,000,000	Rp 17,000,000	Rp 17,000,000	Rp 17,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan (8 orang)	1 Laporan (8 orang)	Rp 134,118,000	Rp 134,118,000	Rp 134,118,000	Rp 134,118,000	Rp 134,118,000	Rp 134,118,000	Rp 134,118,000	Rp 134,118,000	Rp 134,118,000	Rp 134,118,000	Rp 134,118,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1 Kegiatan	1 Kegiatan	Rp 75,000,000	Rp 87,500,000	Rp 87,500,000	Rp 87,500,000	Rp 95,000,000	Rp 95,000,000	Rp 95,000,000	Rp 95,000,000	Rp 95,000,000	Rp 95,000,000	Rp 95,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3 Unit (3 Kendaraan Roda empat)	3 Unit (3 Kendaraan Roda empat)	Rp 75,000,000	Rp 80,000,000	Rp 80,000,000	Rp 80,000,000	Rp 80,000,000	Rp 80,000,000	Rp 80,000,000	Rp 80,000,000	Rp 80,000,000	Rp 80,000,000	Rp 80,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				Rp 7,500,000	Rp 7,500,000	Rp 7,500,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tersedia					Rp -	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000
Pengadaan Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Paket			Rp 33,000,000	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000	Rp 33,000,000
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					85%	88%	Rp 2,788,977,600	Rp 1,260,159,200	Rp 1,290,760,680	Rp 1,322,127,197	Rp 1,354,277,877	Rp 1,386,777,877	Rp 1,386,777,877	Rp 1,386,777,877	Rp 1,386,777,877	Rp 1,386,777,877	Rp 1,386,777,877
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2 Kegiatan	2 Kegiatan	Rp 36,100,000	Rp 36,100,000	Rp 36,100,000	Rp 36,100,000	Rp 36,100,000	Rp 36,100,000	Rp 36,100,000	Rp 36,100,000	Rp 36,100,000	Rp 36,100,000	Rp 36,100,000

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1 Laporan (Musrenbang, 75 peserta)	1 Laporan (Musrenbang, 75 peserta)	Rp 12,000,000	1 Laporan (Musrenbang, 75 peserta)	Rp 12,000,000	1 Laporan (Musrenbang, 75 peserta)	Rp 12,000,000	1 Laporan (Musrenbang, 75 peserta)	Rp 12,000,000	1 Laporan (Musrenbang, 75 peserta)	Rp 12,000,000	1 Laporan (Musrenbang, 75 peserta)	Rp 12,000,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1 Dokumen (Belanja Cetak, Makanan Minuman Rapat, Alat Tulis Kantor, Fotocopy)	1 Dokumen (Belanja Cetak, Makanan Minuman Rapat, Alat Tulis Kantor, Fotocopy)	Rp 24,100,000	1 Dokumen (Belanja Cetak, Makanan Minuman Rapat, Alat Tulis Kantor, Fotocopy)	Rp 24,100,000	1 Dokumen (Belanja Cetak, Makanan Minuman Rapat, Alat Tulis Kantor, Fotocopy)	Rp 24,100,000	1 Dokumen (Belanja Cetak, Makanan Minuman Rapat, Alat Tulis Kantor, Fotocopy)	Rp 24,100,000	1 Dokumen (Belanja Cetak, Makanan Minuman Rapat, Alat Tulis Kantor, Fotocopy)	Rp 24,100,000	1 Dokumen (Belanja Cetak, Makanan Minuman Rapat, Alat Tulis Kantor, Fotocopy)	Rp 24,100,000
	Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					13 Dokumen	13 Dokumen	Rp 2,752,877,680	13 Dokumen	Rp 1,224,059,200	13 Dokumen	Rp 1,254,660,680	13 Dokumen	Rp 1,286,027,197	13 Dokumen	Rp 1,318,177,877	13 Dokumen	Rp 1,350,677,877
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	13 Laporan Kelurahan	13 Laporan Kelurahan	Rp 2,752,877,680	13 Laporan Kelurahan	Rp 1,224,059,200	13 Laporan Kelurahan	Rp 1,254,660,680	13 Laporan Kelurahan	Rp 1,286,027,197	13 Laporan Kelurahan	Rp 1,318,177,877	13 Laporan Kelurahan	Rp 1,350,677,877
						1 Laporan (Kelurahan Bajak)	1 Laporan (Kelurahan Bajak)	Rp 239,297,600	1 Laporan (Kelurahan Bajak)	Rp 105,320,000	1 Laporan (Kelurahan Bajak)	Rp 107,953,000	1 Laporan (Kelurahan Bajak)	Rp 110,651,825	1 Laporan (Kelurahan Bajak)	Rp 113,418,121	1 Laporan (Kelurahan Bajak)	Rp 115,918,121
						1 Laporan (Kelurahan Berkas)	1 Laporan (Kelurahan Berkas)	Rp 199,718,400	1 Laporan (Kelurahan Berkas)	Rp 94,540,800	1 Laporan (Kelurahan Berkas)	Rp 96,904,320	1 Laporan (Kelurahan Berkas)	Rp 99,326,928	1 Laporan (Kelurahan Berkas)	Rp 101,810,101	1 Laporan (Kelurahan Berkas)	Rp 104,310,101
						1 Laporan (Kelurahan Jitra)	1 Laporan (Kelurahan Jitra)	Rp 186,053,600	1 Laporan (Kelurahan Jitra)	Rp 88,400,000	1 Laporan (Kelurahan Jitra)	Rp 90,610,000	1 Laporan (Kelurahan Jitra)	Rp 92,875,250	1 Laporan (Kelurahan Jitra)	Rp 95,197,131	1 Laporan (Kelurahan Jitra)	Rp 97,697,131
						1 Laporan (Kelurahan Kampung Bali)	1 Laporan (Kelurahan Kampung Bali)	Rp 195,118,400	1 Laporan (Kelurahan Kampung Bali)	Rp 90,200,000	1 Laporan (Kelurahan Kampung Bali)	Rp 92,455,000	1 Laporan (Kelurahan Kampung Bali)	Rp 94,766,375	1 Laporan (Kelurahan Kampung Bali)	Rp 97,135,534	1 Laporan (Kelurahan Kampung Bali)	Rp 99,635,534
						1 Laporan (Kelurahan Kebun Keling)	1 Laporan (Kelurahan Kebun Keling)	Rp 191,318,400	1 Laporan (Kelurahan Kebun Keling)	Rp 86,400,000	1 Laporan (Kelurahan Kebun Keling)	Rp 88,560,000	1 Laporan (Kelurahan Kebun Keling)	Rp 90,774,000	1 Laporan (Kelurahan Kebun Keling)	Rp 93,043,350	1 Laporan (Kelurahan Kebun Keling)	Rp 95,543,350
						1 Laporan (Kelurahan Kebun Roos)	1 Laporan (Kelurahan Kebun Roos)	Rp 234,197,600	1 Laporan (Kelurahan Kebun Roos)	Rp 100,025,600	1 Laporan (Kelurahan Kebun Roos)	Rp 102,526,240	1 Laporan (Kelurahan Kebun Roos)	Rp 105,089,396	1 Laporan (Kelurahan Kebun Roos)	Rp 107,716,631	1 Laporan (Kelurahan Kebun Roos)	Rp 110,216,631
						1 Laporan (Kelurahan Malabero)	1 Laporan (Kelurahan Malabero)	Rp 254,005,200	1 Laporan (Kelurahan Malabero)	Rp 90,190,800	1 Laporan (Kelurahan Malabero)	Rp 92,445,570	1 Laporan (Kelurahan Malabero)	Rp 94,756,709	1 Laporan (Kelurahan Malabero)	Rp 97,125,627	1 Laporan (Kelurahan Malabero)	Rp 99,625,627
						1 Laporan (Kelurahan Pasar Baru)	1 Laporan (Kelurahan Pasar Baru)	Rp 180,474,500	1 Laporan (Kelurahan Pasar Baru)	Rp 82,820,900	1 Laporan (Kelurahan Pasar Baru)	Rp 84,891,423	1 Laporan (Kelurahan Pasar Baru)	Rp 87,013,708	1 Laporan (Kelurahan Pasar Baru)	Rp 89,189,051	1 Laporan (Kelurahan Pasar Baru)	Rp 91,689,051
						1 Laporan (Kelurahan Pasar Melintang)	1 Laporan (Kelurahan Pasar Melintang)	Rp 216,445,200	1 Laporan (Kelurahan Pasar Melintang)	Rp 104,262,000	1 Laporan (Kelurahan Pasar Melintang)	Rp 106,868,550	1 Laporan (Kelurahan Pasar Melintang)	Rp 109,540,264	1 Laporan (Kelurahan Pasar Melintang)	Rp 112,278,770	1 Laporan (Kelurahan Pasar Melintang)	Rp 114,778,770
						1 Laporan (Kelurahan Pintu Batu)	1 Laporan (Kelurahan Pintu Batu)	Rp 171,922,500	1 Laporan (Kelurahan Pintu Batu)	Rp 103,036,500	1 Laporan (Kelurahan Pintu Batu)	Rp 105,612,413	1 Laporan (Kelurahan Pintu Batu)	Rp 108,252,723	1 Laporan (Kelurahan Pintu Batu)	Rp 110,959,041	1 Laporan (Kelurahan Pintu Batu)	Rp 113,459,041
						1 Laporan (Kelurahan Pondok Besi)	1 Laporan (Kelurahan Pondok Besi)	Rp 203,371,600	1 Laporan (Kelurahan Pondok Besi)	Rp 97,675,600	1 Laporan (Kelurahan Pondok Besi)	Rp 100,117,490	1 Laporan (Kelurahan Pondok Besi)	Rp 102,620,427	1 Laporan (Kelurahan Pondok Besi)	Rp 105,185,938	1 Laporan (Kelurahan Pondok Besi)	Rp 107,685,938
						1 Laporan (Kelurahan Sumur Meleleh)	1 Laporan (Kelurahan Sumur Meleleh)	Rp 205,323,400	1 Laporan (Kelurahan Sumur Meleleh)	Rp 92,363,400	1 Laporan (Kelurahan Sumur Meleleh)	Rp 94,672,485	1 Laporan (Kelurahan Sumur Meleleh)	Rp 97,039,297	1 Laporan (Kelurahan Sumur Meleleh)	Rp 99,465,280	1 Laporan (Kelurahan Sumur Meleleh)	Rp 101,965,280
						1 Laporan (Kelurahan Tengah Padang)	1 Laporan (Kelurahan Tengah Padang)	Rp 275,631,200	1 Laporan (Kelurahan Tengah Padang)	Rp 88,823,600	1 Laporan (Kelurahan Tengah Padang)	Rp 91,044,190	1 Laporan (Kelurahan Tengah Padang)	Rp 93,320,295	1 Laporan (Kelurahan Tengah Padang)	Rp 95,653,302	1 Laporan (Kelurahan Tengah Padang)	Rp 98,153,302
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				80%	81%	Rp 3.040.000,000	82%	Rp 4.558.818,400	83%	Rp 4.584.818,400	84%	Rp 4.623.818,400	85%	Rp 4.649.818,400	86%	Rp 4.649.818,400
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dikoordinasikan Terpenuhi			13 Dokumen	13 Dokumen	Rp 2.860.000,000	13 Dokumen	Rp 2.860.000,000	13 Dokumen	Rp 2.860.000,000	13 Dokumen	Rp 2.899.000,000	13 Dokumen	Rp 2.925.000,000	13 Dokumen	Rp 2.925.000,000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						PKK Kelurahan Tengah Padang	Rp. 10,000,000	PKK Kelurahan Tengah Padang	Rp. 10,000,000	PKK Kelurahan Tengah Padang	Rp. 12,000,000	PKK Kelurahan Tengah Padang	Rp. 12,000,000	PKK Kelurahan Tengah Padang	Rp. 12,000,000	PKK Kelurahan Tengah Padang	Rp. 12,000,000	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	3 Laporan (Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI), Kegiatan Lomba Kelurahan dan Kegiatan Pembinaan Kota Sehat)	3 Laporan (Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI), Kegiatan Lomba Kelurahan dan Kegiatan Pembinaan Kota Sehat)	Rp. 30,000,000	3 Laporan (Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI), Kegiatan Lomba Kelurahan dan Kegiatan Pembinaan Kota Sehat)	Rp. 20,000,000	3 Laporan (Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI), Kegiatan Lomba Kelurahan dan Kegiatan Pembinaan Kota Sehat)	Rp. 20,000,000	3 Laporan (Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI), Kegiatan Lomba Kelurahan dan Kegiatan Pembinaan Kota Sehat)	Rp. 20,000,000	3 Laporan (Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI), Kegiatan Lomba Kelurahan dan Kegiatan Pembinaan Kota Sehat)	Rp. 20,000,000	3 Laporan (Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI), Kegiatan Lomba Kelurahan dan Kegiatan Pembinaan Kota Sehat)	Rp. 20,000,000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						13 Dokumen		13 Dokumen	Rp. 1,528,818,400	13 Dokumen	Rp. 1,528,818,400	13 Dokumen	Rp. 1,528,818,400	13 Dokumen	Rp. 1,528,818,400	13 Dokumen	Rp. 1,528,818,400	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						13 Laporan Kelurahan		13 Laporan Kelurahan	Rp. 1,528,818,400	13 Laporan Kelurahan	Rp. 1,528,818,400	13 Laporan Kelurahan	Rp. 1,528,818,400	13 Laporan Kelurahan	Rp. 1,528,818,400	13 Laporan Kelurahan	Rp. 1,528,818,400	
						1 Laporan (Kelurahan Bajak)		1 Laporan (Kelurahan Bajak)	Rp. 133,977,600	1 Laporan (Kelurahan Bajak)	Rp. 133,977,600	1 Laporan (Kelurahan Bajak)	Rp. 133,977,600	1 Laporan (Kelurahan Bajak)	Rp. 133,977,600	1 Laporan (Kelurahan Bajak)	Rp. 133,977,600	
						1 Laporan (Kelurahan Berkas)		1 Laporan (Kelurahan Berkas)	Rp. 105,177,600	1 Laporan (Kelurahan Berkas)	Rp. 105,177,600	1 Laporan (Kelurahan Berkas)	Rp. 105,177,600	1 Laporan (Kelurahan Berkas)	Rp. 105,177,600	1 Laporan (Kelurahan Berkas)	Rp. 105,177,600	
						1 Laporan (Kelurahan Jitra)		1 Laporan (Kelurahan Jitra)	Rp. 97,653,600	1 Laporan (Kelurahan Jitra)	Rp. 97,653,600	1 Laporan (Kelurahan Jitra)	Rp. 97,653,600	1 Laporan (Kelurahan Jitra)	Rp. 97,653,600	1 Laporan (Kelurahan Jitra)	Rp. 97,653,600	
						1 Laporan (Kelurahan Kampung Bali)		1 Laporan (Kelurahan Kampung Bali)	Rp. 104,918,400	1 Laporan (Kelurahan Kampung Bali)	Rp. 104,918,400	1 Laporan (Kelurahan Kampung Bali)	Rp. 104,918,400	1 Laporan (Kelurahan Kampung Bali)	Rp. 104,918,400	1 Laporan (Kelurahan Kampung Bali)	Rp. 104,918,400	
						1 Laporan (Kelurahan Kebun Keling)		1 Laporan (Kelurahan Kebun Keling)	Rp. 104,918,400	1 Laporan (Kelurahan Kebun Keling)	Rp. 104,918,400	1 Laporan (Kelurahan Kebun Keling)	Rp. 104,918,400	1 Laporan (Kelurahan Kebun Keling)	Rp. 104,918,400	1 Laporan (Kelurahan Kebun Keling)	Rp. 104,918,400	
						1 Laporan (Kelurahan Kebun Roos)		1 Laporan (Kelurahan Kebun Roos)	Rp. 134,172,000	1 Laporan (Kelurahan Kebun Roos)	Rp. 134,172,000	1 Laporan (Kelurahan Kebun Roos)	Rp. 134,172,000	1 Laporan (Kelurahan Kebun Roos)	Rp. 134,172,000	1 Laporan (Kelurahan Kebun Roos)	Rp. 134,172,000	
						1 Laporan (Kelurahan Malabero)		1 Laporan (Kelurahan Malabero)	Rp. 163,814,400	1 Laporan (Kelurahan Malabero)	Rp. 163,814,400	1 Laporan (Kelurahan Malabero)	Rp. 163,814,400	1 Laporan (Kelurahan Malabero)	Rp. 163,814,400	1 Laporan (Kelurahan Malabero)	Rp. 163,814,400	
						1 Laporan (Kelurahan Pasar Baru)		1 Laporan (Kelurahan Pasar Baru)	Rp. 97,653,600	1 Laporan (Kelurahan Pasar Baru)	Rp. 97,653,600	1 Laporan (Kelurahan Pasar Baru)	Rp. 97,653,600	1 Laporan (Kelurahan Pasar Baru)	Rp. 97,653,600	1 Laporan (Kelurahan Pasar Baru)	Rp. 97,653,600	
						1 Laporan (Kelurahan Pasar Melintang)		1 Laporan (Kelurahan Pasar Melintang)	Rp. 112,183,200	1 Laporan (Kelurahan Pasar Melintang)	Rp. 112,183,200	1 Laporan (Kelurahan Pasar Melintang)	Rp. 112,183,200	1 Laporan (Kelurahan Pasar Melintang)	Rp. 112,183,200	1 Laporan (Kelurahan Pasar Melintang)	Rp. 112,183,200	
						1 Laporan (Kelurahan Pintu Batu)		1 Laporan (Kelurahan Pintu Batu)	Rp. 68,886,000	1 Laporan (Kelurahan Pintu Batu)	Rp. 68,886,000	1 Laporan (Kelurahan Pintu Batu)	Rp. 68,886,000	1 Laporan (Kelurahan Pintu Batu)	Rp. 68,886,000	1 Laporan (Kelurahan Pintu Batu)	Rp. 68,886,000	
						1 Laporan (Kelurahan Pondok Besi)		1 Laporan (Kelurahan Pondok Besi)	Rp. 105,696,000	1 Laporan (Kelurahan Pondok Besi)	Rp. 105,696,000	1 Laporan (Kelurahan Pondok Besi)	Rp. 105,696,000	1 Laporan (Kelurahan Pondok Besi)	Rp. 105,696,000	1 Laporan (Kelurahan Pondok Besi)	Rp. 105,696,000	
						1 Laporan (Kelurahan Sumur Meleleh)		1 Laporan (Kelurahan Sumur Meleleh)	Rp. 112,960,000	1 Laporan (Kelurahan Sumur Meleleh)	Rp. 112,960,000	1 Laporan (Kelurahan Sumur Meleleh)	Rp. 112,960,000	1 Laporan (Kelurahan Sumur Meleleh)	Rp. 112,960,000	1 Laporan (Kelurahan Sumur Meleleh)	Rp. 112,960,000	
						1 Laporan (Kelurahan Tengah Padang)		1 Laporan (Kelurahan Tengah Padang)	Rp. 186,807,600	1 Laporan (Kelurahan Tengah Padang)	Rp. 186,807,600	1 Laporan (Kelurahan Tengah Padang)	Rp. 186,807,600	1 Laporan (Kelurahan Tengah Padang)	Rp. 186,807,600	1 Laporan (Kelurahan Tengah Padang)	Rp. 186,807,600	
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum		Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum		85%	86%	Rp. 350,800,000	87%	Rp. 350,800,000	87%	Rp. 350,800,000	87%	Rp. 350,800,000	88%	Rp. 350,800,000	88%	Rp. 350,800,000	88%	Rp. 350,800,000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum Terpenuhi		2 Dokumen	2 Dokumen	Rp. 350,800,000	2 Dokumen	Rp. 350,800,000	2 Dokumen	Rp. 350,800,000	2 Dokumen	Rp. 350,800,000	2 Dokumen	Rp. 350,800,000	2 Dokumen	Rp. 350,800,000	2 Dokumen	Rp. 350,800,000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1 Laporan (Kegiatan Pembinaan Linmas)	1 Laporan (Kegiatan Pembinaan Linmas)	Rp. 10,000,000	1 Laporan (Kegiatan Pembinaan Linmas)	Rp. 10,000,000	1 Laporan (Kegiatan Pembinaan Linmas)	Rp. 10,000,000	1 Laporan (Kegiatan Pembinaan Linmas)	Rp. 10,000,000	1 Laporan (Kegiatan Pembinaan Linmas)	Rp. 10,000,000	1 Laporan (Kegiatan Pembinaan Linmas)	Rp. 10,000,000	

	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	1 Laporan Belanja Operasional Perangkat Keagamaan Kelurahan (Da'vMubaligh, Guru Ngaji, Imam, Khatib, Bilal, Gharim dan Rubiah)	1 Laporan Belanja Operasional Perangkat Keagamaan Kelurahan (Da'vMubaligh, Guru Ngaji, Imam, Khatib, Bilal, Gharim dan Rubiah)	Rp 340,800,000	1 Laporan Belanja Operasional Perangkat Keagamaan Kelurahan (Da'vMubaligh, Guru Ngaji, Imam, Khatib, Bilal, Gharim dan Rubiah)	Rp 340,800,000	1 Laporan Belanja Operasional Perangkat Keagamaan Kelurahan (Da'vMubaligh, Guru Ngaji, Imam, Khatib, Bilal, Gharim dan Rubiah)	Rp 340,800,000	1 Laporan Belanja Operasional Perangkat Keagamaan Kelurahan (Da'vMubaligh, Guru Ngaji, Imam, Khatib, Bilal, Gharim dan Rubiah)	Rp 340,800,000	1 Laporan Belanja Operasional Perangkat Keagamaan Kelurahan (Da'vMubaligh, Guru Ngaji, Imam, Khatib, Bilal, Gharim dan Rubiah)	Rp 340,800,000	1 Laporan Belanja Operasional Perangkat Keagamaan Kelurahan (Da'vMubaligh, Guru Ngaji, Imam, Khatib, Bilal, Gharim dan Rubiah)	Rp 340,800,000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				80%	81%	Rp 15,000,000	82%	Rp 10,000,000	83%	Rp 15,000,000	84%	Rp 15,000,000	85%	Rp 15,000,000	86%	Rp 15,000,000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 15,000,000	2 Dokumen	Rp 10,000,000	2 Dokumen	Rp 15,000,000	2 Dokumen	Rp 15,000,000	2 Dokumen	Rp 15,000,000	2 Dokumen	Rp 15,000,000
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1 Laporan (Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial)	1 Laporan (Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial)	Rp 5,000,000	1 Laporan (Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial)	Rp 5,000,000	1 Laporan (Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial)	Rp 5,000,000	1 Laporan (Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial)	Rp 5,000,000	1 Laporan (Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial)	Rp 5,000,000	1 Laporan (Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial)	Rp 5,000,000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen (Kegiatan Rakor Camat Se-Kota Bengkulu)	1 Dokumen (Kegiatan Rakor Camat Se-Kota Bengkulu)	Rp 10,000,000	1 Dokumen (Kegiatan Rakor Camat Se-Kota Bengkulu)	Rp 5,000,000	1 Dokumen (Kegiatan Rakor Camat Se-Kota Bengkulu)	Rp 10,000,000	1 Dokumen (Kegiatan Rakor Camat Se-Kota Bengkulu)	Rp 10,000,000	1 Dokumen (Kegiatan Rakor Camat Se-Kota Bengkulu)	Rp 10,000,000	1 Dokumen (Kegiatan Rakor Camat Se-Kota Bengkulu)	Rp 10,000,000
TOTAL								Rp 16,143,944,684		Rp 16,359,608,932		Rp 16,686,801,111		Rp 17,020,537,133		Rp 17,360,947,876		Rp 17,621,362,093

Bengkulu, 2025
Kepala Kecamatan Teluk Segara

BENY HARTANTO, S.Ag

Pembina/ IV.a

NIP. 19680930 199203 1 004

Rp 2.766,296 2500000

Rp 2.483,173 2500000

Rp 2.321,881 2500000

Rp 2.369,159 2500000

Rp 2.269,350 2500000

Rp 2.627,235 2500000

Rp 2.368,918 2500000

Rp 2.175,343 2500000

Rp 2.738,507 2500000

Rp 2.706,318 2500000

Rp 2.565,511 2500000

Rp 2.425,982 2500000

Rp 2.333,007 2500000

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang terfasilitasi dengan baik		
		<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan (Renja/ P-Renja, RKA/DPA, Tepra, Monev, Evaluasi PD, LKJIP/ SAKIP, LPPD PD, Neraca, Calk, Rekon Aset)
		<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/Bulan (ASN Kecamatan dan 13 Kelurahan)
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen (1 Pengguna Anggaran, 1 PPTK, 1 PPK, 1 Bendahara Pengeluaran, 1 Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Lembur)
		<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>- Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket (4 Jenis)
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket (4 Jenis)
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket (14 Jenis)
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket (2 jenis)
		Jumlah Paket Bahan/ Material yang disediakan	e. Penyediaan Bahan/ Material	1 Paket (20 jenis)
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	f. Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan (2 jenis)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan (1 jenis)
		<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan (1 jenis)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan (2 jenis)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan (4 jenis)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan (8 orang)
		<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit (3 Kendaraan Roda empat)
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		
		<i>Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>- Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Dokumen (Musrenbang, 75 peserta)
		Jumlah Dokumen Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen (Belanja Cetak, Makanan Minuman Rapat, Alat Tulis Kantor, Fotocopy)
		<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di</i>	<i>- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	

		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (13 Kelurahan)	a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan Kelurahan
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat		
		Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (LPM)	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	13 Lembaga Kemasyarakatan (LPM) di 13 Kelurahan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (13 Kelurahan)	b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	13 Pembangunan Sarana dan Prasarana di 13 Kelurahan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (13 Kelurahan)	c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	13 Pokmas dan Ormas di 13 Kelurahan
		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan	a. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	PKK Kecamatan Teluk Segara dan PKK 13 Kelurahan
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat	b. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup	3 Laporan (Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI), Kegiatan Lomba Kelurahan dan Kegiatan Pembinaan Kota Sehat)
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Peran Serta Tokoh Agama/ Masyarakat dalam Pembinaan Masyarakat		
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan (Kegiatan Pembinaan Linmas)
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	- Belanja Operasional Perangkat Keagamaan Kelurahan (Da'i/Mubaligh, Guru Ngaji, Imam, Khatib, Bilal, Gharim dan Rubiah)
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		
		Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
		Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	a. Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan (Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial)
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen (Kegiatan Rakor Camat Se-Kota Bengkulu)

Bengkulu, 2025
Kepala Kecamatan Teluk Segara

BENY HARTANTO, S.Ag
Pembina/ IV.a
NIP. 19680930 199203 1 004

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (PD)	Indeks	B	BB	BB	BB	BB	BB	Hasil Evaluasi atas implementasi Sakip Perangkat Daerah (PD)
2.	Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah	1 Inovasi	1 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan
3.	Persentase Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	82%	85%	90%	90%	90%	90%	Jumlah Permohonan Layanan Administrasi di Kecamatan : Jumlah Layanan Administrasi Perizinan/non Perizinan yang diterbitkan x 100%

Bengkulu, 2025
Kepala Kecamatan Teluk Segara

BENY HARTANTO, S.Ag
Pembina/ IV.a
NIP. 19680930 199203 1 004

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (PD)	Indeks	B	BB	BB	BB	BB	BB	Hasil Evaluasi atas implementasi Sakip Perangkat Daerah (PD)
2.	Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah	1 Inovasi	1 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan
3.	Persentase Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	82%	85%	90%	90%	90%	90%	Jumlah Permohonan Layanan Administrasi di Kecamatan : Jumlah Layanan Administrasi Perizinan/non Perizinan yang diterbitkan x 100%

Bengkulu, 2025
Kepala Kecamatan Teluk Segara

BENY HARTANTO, S.Ag
Pembina/ IV.a
NIP. 19680930 199203 1 004